



**RENCANA KERJA
KECAMATAN
KARANGRAYUNG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KECAMATAN
KARANGRAYUNG
Jln. Raya Karangrayung-Juwangi KARANGRAYUNG - 58163

KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN

GROBOGAN TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan diawali sejak tahap perencanaan yang merupakan landasan sekaligus pemandu arah pembangunan guna mencapai dengan tepat pada tujuannya. Selaras dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi subkegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, kelompok sasaran, serta pendanaan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi yang strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dan secara simultan akan mendorong pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. penyusunan rancangan awal Renja
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah
- d. Perumusan rancangan akhir Renja
- e. Penetapan Renja

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Karangrayung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara

Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12 Nomor Registrasi Provinsi Jawa Tengah 12-338/2021);

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud
Rancangan Awal Renja Kecamatan Karangrayung disusun sebagai dokumen awal yang selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi rancangan renja dan renja yang menjadi pedoman

arah bagi Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Karangrayung.

- Tujuan
Rancangan Awal Renja Kecamatan Karangrayung disusun agar tujuan dan sasaran Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2026 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan yang menjadi Acuan
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan
pada struktur

anggarannya memiliki 2 program dan kegiatan serta 20 Sub kegiatan, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 1) Subkegiatan Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - 1) Subkegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

- 1) Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TAHUN 2025
KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan											
Sasaran-1 : Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		Nilai Evaluasi SAKIP	skor 73,5	Skor 68	skor 73,5	skor 70	skor 73,5	105%	skor 74	skor 73,5	105%
7		UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01	KECAMATAN									
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laporan Keuangan Sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Resiko	65%	40%	50%	50%	50%	100%	55%

7	01	01	1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100%
Sasaran-2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat					Nilai IKM	B (83,88)	B (86,50)	B (86,66)	B (85,60)	B (86,66)	100%	BB (87%)	BB (86,66)	104%
7	01	02		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7	01	02	2.01	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%

7	01	02	2.02	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	02	2.04	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran-2 : Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan					Nilai Evaluasi SAKIP	skor 73,5	Skor 68	skor 73,5	skor 70	skor 73,5	105%	skor 74	skor 73,5	105%
7	01	03		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	03	2.01	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	03	2.03	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	13 lembaga	13 lembaga	13 lembaga	13 lembaga	13 lembaga	100	13 lembaga	13 lembaga	100
7	01	04		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	04	2.01	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	05		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	05	2.01	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7	01	06		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

7	01	06	2.01	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
---	----	----	------	--	--	------	------	------	------	------	-----	------	------	-----

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangrayung

Sesuai dengan Keputusan Camat Karangrayung nomor 900/4/KECKRYNG/2026 tahun 2026 Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan memiliki 2 IKU (Indikator Kinerja Utama), yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Karangrayung	B (82,70)	B (82,99)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,88)	B (85,00)	BB (86,5)	BB (86,66)	BB (87,00)	BB (88,00)
2	Nilai Sakip Kecamatan Karangrayung	B (65,00)	B (68,00)	BB (70,00)	BB (72,00)	BB (73,50)	B (65,00)	B (68,00)	B (73,50)	B (73,60)	B (73,70)

Realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi perolehan skor SAKIP Pemda tahun 2025 dengan kategori B diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas tingkat akuntabilitas /pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*)..

Nilai evaluasi dikelompokkan dalam skor/skala prestasi capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan, memimpin perubahan, pekerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 – 80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4	B	> 60 – 70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	> 30 – 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistim untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerpapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sebagai perbandingan kami tampilkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2024 dan 2025 dengan predikat B yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik namun masih tetap memerlukan perbaikan.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai tahun 2024	Nilai tahun 2025
A	Perencanaan Kinerja	30	19,5	
B	Pengukuran Kinerja	30	17,4	
C	Pelaporan Kinerja	15	11,7	
D	Evaluasi Internal	25	18	
Nilai Hasil Evaluasi		100	66,6	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	

Sedangkan untuk kecamatan Karangrayung bersama 18 kecamatan lainnya untuk saat ini belum dinilai oleh Kabupaten sehingga belum bisa mengisi capaian nilai/skor penilaian SAKIP dari Kabupaten. Namun upaya memperbaiki kinerja pelayanan di jajaran kecamatan Karangrayung telah dilakukan dalam rangka bentuk tanggung jawab ikut menyukseskan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan diantaranya adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) ;

- 2) Secara rutin dilakukan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam rentang waktu triwulanan dan tahunan;
- 3) Adanya penilaian setiap tahun dari Kementerian Dalam Negeri terhadap SAKIP Pemda telah memacu seluruh stakeholder SAKIP untuk terus berbenah dalam rangka menuju *result oriented government*.

Nilai SAKIP di Kecamatan Karangrayung Tahun 2024 sebesar 66,6% tercapai 95% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Adapun Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah:

- 1) Pimpinan OPD senantiasa memberikan perhatian dan mendukung implementasi SAKIP sehingga mendorong pencapaian kinerja yang diinginkan;
- 2) Penyusunan perencanaan yang jelas dan terukur serta pemetaan sasaran yang realistis dan relevan
- 3) Adanya dukungan dari aplikasi yang integrated antara keuangan dan kinerja sehingga memudahkan proses dari sejak perencanaan hingga pelaporannya.
- 4) Proses pemantauan dan evaluasi yang rutin serta penggunaan data yang akurat untuk menilai capaian kinerja

Sedangkan Faktor penghambat dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan jumlah atau kualitas SDM di Kecamatan Karangrayung karena BUP mengakibatkan kurangnya personel yang mampu melaksanakan tugas dengan efektif ;
- b. Nilai /skor survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang telah dilakukan oleh Pemda merupakan skor survey yang diperoleh oleh OPD yang menjadi obyek pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Indikator ini pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 83,29% sementara realisasinya sebesar 81,59% tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong atau usaha yang harus dilakukan untuk

mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target nilai kepuasan masyarakat secara terukur dan konsisten;
- 2) Melakukan sosialisasi optimalisasi pelayanan publik; dan
- 3) Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.

Faktor penghambat dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya mekanisme reward and punishment yang baku untuk memacu percepatan peningkatan kualitas pelayanan public di jajaran pemerintah kabupaten Grobogan; dan
- 2) Pelaksanaan survey masih bersifat sampel dan belum seluruh masyarakat yang dilayani ikut berpartisipasi.

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Karangrayung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

- 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
- 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
- 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen

b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
- 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
- 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
- 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat

d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat

- 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial

e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum

- 1) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel

f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes
- 2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi beberapa isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung.
 - b. Kurangnya personel menjadikan banyaknya fungsi yang dirangkap sehingga output kinerja juga kurang maksimal.
 - c. Perlunya integrasi system dan data.
 - d. Koordinasi antar fungsi masih perlu ditingkatkan lagi.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Belum Optimalnya verifikasi dan SPI (Sistem Pengendalian Internal).
 - b. Belum semua unit memahami sistem pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.
3. Isu terkait pelayanan publik.
 - a. Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara menyeluruh(komprehensif) di semua unit pelayanan.
 - b. Masih perlunya sosialisasi kepada masyarakat maupun ASN terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Karangrayung Kab.Grobogan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Rp					Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan												
Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		Indeks Reformasi Birokrasi				2.627.000.000					9.135.458.000	
Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Nilai Evaluasi SAKIP		Nilai	73,70%	1.951.000.000,-	Kecamatan Karangrayung	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	73,6%	9.085.000.000	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Karangrayung	Laporan Keuangan Sesuai SAP	%	100	1.951.000.000		Laporan Keuangan Sesuai SAP	%	100	9.085.000.000	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100		
			Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Resiko	%	60			Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Resiko	%	60		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Karangrayung	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	40.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	40.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun		1		Kecamatan Karangrayung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun		1		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun		1		Kecamatan Karangrayung	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun		1		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		1		Kecamatan Karangrayung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		1		

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun		1		Kecamatan Karangrayung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun		1	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen LKJIP tersusun		1		Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen LKJIP tersusun		1	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		1		Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		1	
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Karangrayung	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	1.195.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	1.400.000.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan	14	1.195.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan	14	1.400.000.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	bulan	12	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	bulan	12	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	12	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	12	-
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun		12	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun		12	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	dokumen	12	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	dokumen	12	-

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	12	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	12	-
1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Karangrayung	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	%	100	-	Kecamatan Karangrayung	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	%	100	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	10	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	10	-
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	unit	111	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	unit	111	-
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kecamatan Karangrayung	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	orang	14	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	orang	14	-
1.4		AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Karangrayung	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	100	26.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	100	15.000.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	stel	30	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	stel	30	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Karangrayung	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	20	26.000.000	Kecamatan Karangrayung	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	20	15.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	-

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	-
1.5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Karangrayung	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	305.500.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	250.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit	10	20.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit	10	10.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	20	35.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	20	40.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	10	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	10	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	50	78.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	50	75.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	unit	100	22.500.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	unit	100	10.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	unit	12	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	unit	12	-
		Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	unit	20	35.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	unit	20	35.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	60	115.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	60	80.000.000

		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Karangrayung	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	unit			Kecamatan Karangrayung	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	Unit			
	1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Karangrayung	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	10.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	7.100.000.000	Pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Karangrayung
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	unit			Kecamatan Karangrayung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Unit			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit			Kecamatan Karangrayung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit			
		Pengadaan Mebel	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	10	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	10	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	10	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	10	-	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	unit	10	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	Unit	10	7.100.000.000	Pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Karangrayung
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	unit		-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	unit		-	

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	unit	1	10.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	unit	0	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	1	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	1	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	1	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	1	-
	1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Karangrayung	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	119.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	110.000.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	bulan	12	4.500.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	Laporan	12	4.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	27.500.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	16.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	87.500.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	90.000.000

1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Karangrayung	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	255.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	170.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit	7	30.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit	7	15.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Mebel terpelihara	unit	50	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Mebel terpelihara	unit	50	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	unit	12	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	unit	12	-
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara	unit	12	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara	unit	12	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	215.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	150.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	10.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	-

Sasaran II – Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat			Nilai IKM				Nilai IKM					
				%	88	676.000.000		%	88	50.458.000		
2		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Karangrayung	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%	100	- 127.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%	100	-
	2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Karangrayung	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	%	100	-	Kecamatan Karangrayung	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	%	100	-
		7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kali	1	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kali	1	-
	2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Karangrayung	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	%		-	Kecamatan Karangrayung	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	%		-
		7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen pelayanan yang disusun (SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb)	Dok			Kecamatan Karangrayung	Jumlah dokumen pelayanan yang disusun (SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb)	Dok		
		7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah indikator SPM yang didata	Indikator			Kecamatan Karangrayung	Jumlah indikator SPM yang didata	Indikator		

		7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangrayung	Tersusunnya dokumen SKM	Dok			Kecamatan Karangrayung	Tersusunnya dokumen SKM	Dok		
	2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Karangrayung	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	%	100	- 8	Kecamatan Karangrayung	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	%	100	-
		7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Karangrayung	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	Jenis	1	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	Jenis	1	-
		7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah urusan pemerintahan non perizinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jenis	1	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah urusan pemerintahan non perizinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jenis	1	-
		7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan		1	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan		1	-
3		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Karangrayung	Persentase lembaga masyarakat aktif	Persen	100	153.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase lembaga masyarakat aktif	Persen	100	10.000.000
	3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Keg	100	65.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Keg	100	-
		7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes	Desa	14	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes	Desa	13	-
		7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)		14	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)		13	-

	3.2	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kecamatan Karangrayung	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	lembaga	13	48.000.000	Kecamatan Karangrayung	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	lembaga	13	-	
		7.01.03.2.06.06 Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kecamatan Karangrayung	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	3	20.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	13	10.000.000	Analisis kebutuhan Rp 10.000.000 untuk mendanai kegiatan Rakon PKK tingkat kecamatan (kegiatan tahunan)
4		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Karangrayung	Persentase Linmas(kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	persen	100	66.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase Linmas(kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	persen	100	5.230.000	
	4.1	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	40.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	5.230.000	
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam	Kegiatan	1		Kecamatan Karangrayung	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam	Kegiatan	1	5.230.000	
		7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB	Kegiatan	1	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB	Kegiatan	1	-	
	4.2	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Karangrayung	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kegiatan	1	26.000.000	Kecamatan Karangrayung	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kegiatan	1	-	

		7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum	kegiatan	1	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum	kegiatan	1	-	
5		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Karangrayung	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan	12	90.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan	12	12.000.000	
	5.1	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Karangrayung	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan	12	20.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan	12		
		7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kegiatan	1	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kegiatan	1	-	
		7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Karangrayung	Jumlah orang yang mengikuti bimtek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	50	20.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah orang yang mengikuti bimtek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	50	12.000.000	
6		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Karangrayung	Persentase desa dengan tertib administrasi		100	240.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase desa dengan tertib administrasi		100	23.228.000	

6.1	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Karangrayung	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	240.000.000	Kecamatan Karangrayung	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	23.228.000
	7.01.06.2.01.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	1	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	1	-
	7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	14	22.500.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	13	12.612.000
	7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	13	25.000.000	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	13	10.616.000
	7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	13	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	13	-
	7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	13	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	13	-
	7.01.06.2.01.07 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Karangrayung	Jumlah BPD yang dibina	BPD	13	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah BPD yang dibina	BPD	13	-
	7.01.06.2.01.12 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Difasilitasi Tupoksinya	Lembaga	13	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Difasilitasi Tupoksinya	Lembaga	13	-
	7.01.06.2.01.14 Fasilitas Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama (antar Desa dan Pihak Ketiga)	Desa	13	-	Kecamatan Karangrayung	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama (antar Desa dan Pihak Ketiga)	Desa	13	-

	7.01.06.2.01.16 Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Karangrayun g	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	13	-	Kecamatan Karangrayu ng	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	13	-	
	JUMLAH					2.627.000.000						9.135.458.000

Secara umum dari hasil analisis terhadap kebutuhan tahun 2026 tidak terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD. Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah cocok namun ada 1 sub kegiatan yang besarannya berbeda.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditunjukkan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi Prioritas Pembangunan Nasional meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada tema “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata
2. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas.
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

3.1.3 Penetapan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2026

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan kabupaten Grobogan Tahun 2026 adalah **Penguatan Masyarakat yang berdaya saing menuju sejahtera dan berkelanjutan”**.

Untuk mendukung pencapaian tema pembangunan tersebut, dibutuhkan Kebijakan prioritas pelaksanaan di Tahun 2026 ini yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas SDM didukung mutu Pendidikan

dan Kesehatan, pelestarian budaya, prestasi pemuda dan olahraga, serta kesetaraan gender.

2. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran didukung jaminan sosial dan penciptaan lapangan kerja
3. Pengembangan sektor unggulan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah
4. Pemerataan infrastruktur yang handal, ketangguhan daerah, dan kualitas lingkungan hidup
5. Peningkatan reformasi birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas

Sedangkan bila dilihat dari sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2026 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana teruraikan dalam table 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2026

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,36 tahun
		Rata-rata lama Sekolah	7,10 tahun
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,3 tahun
3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Tingkat Capaian APE	Utama (0,7725 - 0,9074)
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	89,22%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	92,9%
		Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	76,28%
		Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	B (0,20-0,44)
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	Indeks Kualitas Air	Indeks 80,95

		Indeks Kualitas Udara	Indeks 87,88
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks 63,55
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks 50,00
6	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks 0,72
7	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,23 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1,48 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	2,63 %/tahun
		Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	1,53 persen
8	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	Nilai investasi di daerah	1.001.255 Milyar Rupiah
9	menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	Indeks Desa Membangun	Indeks 0,72
10	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	1,4 %/tahun
11	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,0 %
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Rata-rata nilai IKM	Kategori B (79,70)
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks Sangat Inovatif
13	Meningkatnya penerapan egovernment yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks 3,5

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	Nilai SAKIP	Nilai B (75)
		Level Maturitas SPIP	Level 3 (3,15)
		Opini BPK	Opini WTP
		Indeks sistem merit	Kategori III (255)
13	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	82,94 %
14	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase Toleransi antar umat beragama	100%
		Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	100%

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangrayung

3.2.2. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Kecamatan Karangrayung dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kecamatan Karangrayung Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan maka tujuan Renja Kecamatan Karangrayung tahun 2026 adalah :

“ Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan ”

3.2.3. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Kecamatan Karangrayung dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran Renja Kecamatan Karangrayung tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	TUJUAN	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Nilai B (83,88)
2	mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP (Penilaian tim Kabupaten)	BB (73,5)

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.2. Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2026 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kecamatan Karangrayung akan melaksanakan 5 program, 10 kegiatan, dan 20 sub kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b.) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Karangrayung tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 202 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan
Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2026 dan Prakiraan Maju 2027
Kecamatan Karangrayung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN				9.135.458.000				2.866.000.000
Sasaran I –Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Nilai Evaluasi SAKIP	Kecamatan Karangrayung	skor 73,5	9.085.000.000	Dana Transfer Umum – DAU		Skor 74	1.985.000.000
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Laporan Keuangan Sesuai SAP		100%				100%	
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		100%				100%	
		Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko		65%				65%	

7	01	01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kecamatan Karangrayung	100%		0	Dana Transfer Umum-DAU	100%	0
7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kecamatan Karangrayung	100%				100%	
7	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kecamatan Karangrayung	100%			Dana Transfer Umum - DAU	100%	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Kecamatan Karangrayung	100%			Dana Transfer Umum - DAU	100%	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Karangrayung	100%			Dana Transfer Umum - DAU	100%	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kecamatan Karangrayung	100%			Dana Transfer Umum - DAU	100%	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Karangrayung	100%				100%	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kecamatan Karangrayung	100%			Dana Transfer Umum - DAU	100%	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Kecamatan Karangrayung	100%	10.000.000		Dana Transfer Umum - DAU	100%	10.000.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Kecamatan Karangrayung	100%			Dana Transfer Umum - DAU	100%	

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase lembaga masyarakat aktif	Kecamatan Karangrayung	100%	5.230.000	Dana Transfer Umum - DAU	100%	5.230.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Kecamatan Karangrayung	100%		Dana Transfer Umum - DAU	100%	
7	01	05			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Kecamatan Karangrayung	12 bulan	13.046.000	Dana Transfer Umum - DAU	12 bulan	13.046.000
7	01	05	2.01		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Kecamatan Karangrayung	100%		Dana Transfer Umum - DAU	12 bulan	

7	01	06		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	Kecamatan Karangrayung	100%	28.312.000	Dana Transfer Umum - DAU		100%	50.000.000
7	01	06	2.01	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	Kecamatan Karangrayung	100%	28.312.000	Dana Transfer Umum - DAU		100%	50.000.000

BAB V

PENUTUP

2.1. Catatan Penting

Rancangan Awal Rencana Kerja adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rancangan Awal Renja Kecamatan Karangrayung Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Karangrayung tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Karangrayung Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2026 Renja Kecamatan Karangrayung terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 20 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 2,621,495,000.00,- (Dua milyar Enam ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Rancangan Awal Renja Kecamatan Karangrayung Tahun 2026 selanjutnya menjadi pedoman awal yang pada tahapan selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi Rancangan Renja dan terakhir menjadi Renja yang bermanfaat bagi Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) Tahun Anggaran 2026.

2.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

CAMAT KARANGRAYUNG


ARIF EFFENDI ZARKASI, S.STP,M.SI
NIP.198203102000121001

